

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

ANALYSIS OF FINANCIAL RATIOS FOR THE EVALUATION OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF THE MALUKU PROVINCIAL GOVERNMENT

Mundawansa Tuasikal^{1*} dan Jabida Latuamury²

Affiliation:

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Correspondence:

wanca.tuasikal@gmail.com

DOI: [10.30598/jak.11.1.27-48](https://doi.org/10.30598/jak.11.1.27-48)

Vol : 11

No : 1

Tahun : 2025

Article Process Submitted:

June 21, 2025

Reviewed:

June 23, 2025

Revised:

June 26, 2025

Accepted:

June 29, 2025

Published:

June 29, 2025

E-ISSN : 2088-0685

P-ISSN : 2089-4333



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

ABSTRACT

This study assesses the financial performance of the Provincial Government of Maluku from 2019 to 2023 using key ratios, including independence, effectiveness, efficiency, expenditure harmony, and growth. The results show that financial independence remains in the "very low" category, indicating strong dependence on central transfers. Revenue effectiveness has improved since 2020, while budget efficiency fluctuated with deficits in 2020 and 2022. Expenditure is increasingly dominated by operational costs, reaching nearly 80% in 2023, which reduces fiscal space for capital investment. Although capital expenditure ratios are relatively stable, they remain below the ideal threshold for infrastructure development. These findings highlight structural dependence and fiscal imbalances as the main challenges for Maluku's financial sustainability.

Keywords: Archipelagic Fiscal Challenges, Budget Efficiency, Expenditure Composition, Fiscal Independence, Regional Financial Performance.

How to cite:

Tuasikal, M & Latuamury, J (2025). ANALYSIS OF FINANCIAL RATIOS FOR THE EVALUATION OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF THE MALUKU PROVINCIAL GOVERNMENT. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11(1), 27-28. (doi: [10.30598/jak.11.1.27-48](https://doi.org/10.30598/jak.11.1.27-48))

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya publik. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu pendekatan yang lazim digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan, yang mencakup rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan kompleksitas geografis dan tantangan fiskal yang tinggi menghadapi tekanan untuk meningkatkan kinerja fiskal demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Penelitian ini memiliki novelty dengan memfokuskan pada analisis rasio keuangan pemerintah Provinsi Maluku dalam periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi tren kinerja fiskal yang spesifik bagi wilayah kepulauan. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih umum dan hanya berfokus pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah daratan (Simanjuntak & Darlis, 2021; Yuliani, 2020), studi ini menekankan pada karakteristik geografis dan struktur fiskal Maluku yang berbeda secara struktural. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam hal pemanfaatan data keuangan publik dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dianalisis secara longitudinal untuk memetakan dinamika kapasitas fiskal daerah secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan belanja publik berbasis wilayah.

Dalam tinjauan pustaka, terdapat beragam pendekatan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya rasio

kemandirian dan efektivitas PAD dalam mencerminkan kinerja fiskal (Sihombing, 2019; Prasetyo & Widodo, 2022), sementara lainnya menekankan pada efisiensi belanja sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2016). Namun demikian, hanya sedikit penelitian yang mengkaji secara spesifik pada konteks wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik belanja infrastruktur tinggi, aksesibilitas rendah, serta ketergantungan tinggi pada dana perimbangan. Oleh karena itu, posisi penelitian ini memperkuat literatur tentang kinerja fiskal daerah dengan memberikan fokus analitis yang lebih kontekstual pada Provinsi Maluku sebagai representasi daerah kepulauan yang memiliki kerentanan fiskal yang khas.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan prioritas pembangunan secara otonom. Selain itu, belum optimalnya rasio efisiensi dan efektivitas belanja publik menunjukkan adanya potensi pemborosan dan lemahnya pengelolaan anggaran yang akuntabel. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan tidak hanya penting untuk menilai kondisi fiskal, tetapi juga untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan lokal.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh rasio keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu lima tahun terakhir, meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan indikator kinerja fiskal daerah serta memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan fiskal di wilayah kepulauan. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis komparatif terhadap data keuangan sekunder, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting dalam mengkaji tata kelola keuangan daerah di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Provinsi Maluku.

Penelitian mengenai analisis rasio keuangan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki basis teoretis yang kuat

dalam kajian keuangan publik dan desentralisasi fiskal. Teori *fiscal decentralization* (Oates, 1999) menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal ke daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong akuntabilitas, serta memperkuat kapabilitas pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah menjadi sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas fiskal, yang salah satunya dilakukan melalui analisis rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rasio keuangan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Halim & Abdullah, 2016).

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan longitudinal. Tipe penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi dan dinamika kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu tertentu. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan berdasarkan indikator rasio keuangan, sedangkan pendekatan longitudinal digunakan untuk menilai perubahan dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan identifikasi tren fiskal yang signifikan (Sugiyono, 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk LRA dan LKPD tahun 2018–2022. Penelitian ini bersifat sensus karena menggunakan seluruh data yang tersedia pada periode tersebut. Rentang lima tahun dipilih untuk memberikan gambaran representatif atas kondisi fiskal yang dinamis.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan resmi

(LRA dan LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku dari BPKD, BPK, dan DJPK. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi daring dan laporan tahunan, dengan validitas dijaga melalui pemeriksaan silang antar sumber resmi.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, dengan definisi operasional sebagai berikut:

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah.
- Rasio Efektivitas Pendapatan: Perbandingan antara realisasi PAD dan target PAD dalam APBD.
- Rasio Efisiensi Belanja Daerah: Perbandingan antara total belanja dan total pendapatan.
- Rasio Pertumbuhan: Persentase pertumbuhan PAD dan belanja daerah dari tahun sebelumnya.
- Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal: Perbandingan PAD terhadap total belanja daerah yang mencerminkan tingkat otonomi fiskal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan selama periode tahun 2018 hingga 2022. Setiap rasio keuangan dianalisis untuk mengetahui kategori kinerja, seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, atau buruk, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Permendagri No. 19 Tahun 2020. Selain itu, dilakukan analisis tren (trend analysis) untuk mengetahui arah perkembangan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Visualisasi grafik digunakan untuk memperkuat interpretasi data dan mendeteksi pola pergerakan yang signifikan. Untuk pengujian hipotesis, digunakan pendekatan analisis deskriptif inferensial melalui perhitungan rerata, standar deviasi, dan tren tahunan, serta dilakukan uji signifikansi sederhana menggunakan *paired sample t-test* jika ditemukan variabel yang perlu

dibandingkan antara dua kondisi fiskal (misalnya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19), dengan bantuan software statistik seperti SPSS. Kriteria penilaian merujuk pada standar rasio keuangan menurut Kementerian Dalam Negeri dan literatur relevan (Mahmudi, 2016; Halim & Abdullah, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Deskripsi Data

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah Indonesia Timur. Provinsi ini terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar, dengan luas wilayah sekitar 54.185 km² (termasuk wilayah perairan). Letak Geografis Provinsi Maluku terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, serta diapit oleh Laut Banda dan Laut Seram dan Jumlah Kabupaten/Kota Terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk Provinsi Maluku mencapai 1,8 juta jiwa. Kepadatan penduduk relatif rendah, yaitu sekitar 33 jiwa/km², karena wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau, laju pertumbuhan penduduk Maluku rata-rata 1,2% per tahun.

Pada tahun 2022, PDRB Provinsi Maluku mencapai Rp 54,2 triliun. Sementara Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDRB dan Tingkat kemiskinan di Maluku pada tahun 2023 sebesar 15,2%, masih di atas rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,5%. Infrastruktur transportasi masih terbatas, terutama di daerah kepulauan. Bandara utama adalah Bandara Pattimura di Ambon, dan pelabuhan utama adalah Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon. Rasio elektrifikasi mencapai 95%, tetapi masih terdapat daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Jaringan telekomunikasi sudah menjangkau sebagian besar wilayah, tetapi kualitas dan kecepatan internet masih perlu ditingkatkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan

bagi seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku. RPJMN ini berorientasi pada pencapaian visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi dan pembangunan yang inklusif Berikut adalah orientasi RPJMN Provinsi Maluku yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah: Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur; Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Penguatan Ketahanan Pangan; Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana, dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Analisa Data

Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah Provinsi Maluku dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2019–2024. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku pada penelitian ini adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, rasio keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang didapat dari portal web direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu mandiri secara finansial tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada

Tabel 1
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2019 - 2023

TAHUN	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Daerah	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
2019	482.810.000.000	2.622.550.000.000	18,41%	Instruktif	Rendah Sekali
2020	545.750.000.000	2.498.870.000.000	21,84%	Instruktif	Rendah Sekali
2021	550.808.914.760	2.711.163.625.310	20,32%	Instruktif	Rendah Sekali
2022	637.950.000.000	2.273.930.000.000	28,05%	Konsultatif	Rendah
2023	664.660.000.000	3.068.560.000.000	21,66%	Instruktif	Rendah Sekali

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Provinsi Maluku masih sangat rendah sepanjang 2019–2023, dengan kisaran 18,41%–28,05%. Tahun 2019 rasio tercatat 18,41% dengan pola hubungan “Instruktif,” mencerminkan ketergantungan penuh pada transfer pusat. Tahun 2020–2021 PAD meningkat, tetapi rasio kemandirian tetap rendah (21,84% dan 20,32%) karena transfer pusat juga naik, sehingga pola hubungan tidak berubah. Tahun 2022 terjadi peningkatan rasio hingga 28,05% dan pola hubungan bergeser menjadi “Konsultatif,” namun kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2023 rasio kembali turun menjadi 21,66% dengan pola hubungan kembali “Instruktif.” Secara keseluruhan, ketergantungan pada pemerintah pusat tetap dominan dan kemampuan keuangan daerah masih dalam kategori “Rendah Sekali.”

Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas PAD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai target yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap Anggaran PAD yang ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

$$Realisasi\ PAD = \frac{Rasio\ Efektivitas\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 2
Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektifitas PAD	Kriteria
2019	482.810.000.000	532.800.000.000	90,62%	Tidak Efektif
2020	545.750.000.000	526.650.000.000	103,63%	Efektif
2021	550.808.914.760	545.750.000.000	100,93%	Efektif
2022	637.950.000.000	588.890.000.000	108,33%	Efektif
2023	664.660.000.000	619.040.000.000	107,37%	Efektif

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Berdasarkan Tabel 2 Pada tahun 2019, realisasi PAD hanya mencapai 90,62% dari target yang ditetapkan. Meski mendekati batas kategori “Efektif,” capaian ini tetap masuk dalam kategori “Tidak Efektif.” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mencapai target PAD yang telah direncanakan. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan kinerja PAD dengan rasio efektivitas sebesar 103,63%, yang berarti realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, meskipun tahun ini dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, rasio efektivitas PAD mencapai 100,93%, yang berarti realisasi PAD sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan PAD dan perbaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 mencatat pencapaian yang lebih baik dengan 108,33%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan PAD melebihi target. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh perbaikan kebijakan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi sektor-sektor pendapatan daerah. Pada tahun 2023, efektivitas PAD tetap tinggi dengan realisasi yang melampaui target (107,37%). Hal ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan PAD, dengan

kemungkinan adanya peningkatan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah ukuran untuk menilai seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanjanya. Rasio ini membandingkan total belanja daerah dengan total pendapatan daerah guna melihat seberapa besar dana yang digunakan untuk menghasilkan output pemerintahan yang optimal. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi I} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah adalah terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan daerah	Rasio Efisien si keuangan Daerah	Kriteria
2019	2.974.060.000.000	3.108.920.000.000	95,66%	Efisien
2020	3.008.050.000.000	3.045.830.000.000	98,76%	Efisien
2021	2.930.408.271.240	3.263.530.689.180	89,79%	Efisien
2022	3.053.180.000.000	2.948.180.000.000	103,56%	Tidak Efisien
2023	2.495.290.000.000	3.068.560.000.000	81,32%	Efisien

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Berdasarkan Tabel 3 menggambarkan bahwa tahun 2019

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi 95,66% (Efisien, namun mendekati tidak efisien). Pemerintah daerah menghabiskan 95,66% dari pendapatan untuk belanja daerah, sehingga masih dalam kategori efisien, tetapi cukup tinggi. Pengelolaan anggaran cukup ketat, namun terdapat kecenderungan belanja yang hampir menyamai

pendapatan sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian belanja agar rasio mendekati rentang ideal (60%-80%)

Tahun 2020 Rasio Efisiensi: 98,76% (Efisien, tetapi hampir tidak efisien) ini menunjukkan bahwa Pemerintah hampir menghabiskan seluruh pendapatan daerah (98,76%), yang menunjukkan efisiensi yang sangat rendah. Lonjakan belanja kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, seperti alokasi dana untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka daerah bisa mengalami defisit anggaran. Tahun 2021 Rasio Efisiensi: 89,79% (Masih Efisien, tetapi lebih baik dari 2020). Ada penurunan rasio efisiensi dari 98,76% ke 89,79%, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan belanja daerah. Indikasi Pemerintah mulai lebih bijak dalam mengendalikan pengeluaran. Namun, rasio masih cukup tinggi dibandingkan dengan rentang efisiensi ideal (60%-80%).

Tahun 2022 Rasio Efisiensi: 103,56% (Tidak Efisien) . Belanja daerah lebih besar dari pendapatan (103,56%), yang berarti terjadi defisit anggaran. Pemerintah membelanjakan lebih dari yang diperoleh, kemungkinan menggunakan dana cadangan atau utang daerah. Kondisi ini tidak sehat dalam jangka panjang dan perlu dikendalikan untuk menghindari ketergantungan pada pinjaman atau sumber pendapatan tidak tetap. Tahun 2023 Rasio Efisiensi: 81,32% (Efisien, lebih baik dibanding tahun sebelumnya). Terjadi perbaikan signifikan dari tahun 2022 (103,56%) menjadi 81,32%, mendekati batas efisiensi ideal. Pemerintah berhasil menurunkan belanja daerah dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Jika tren ini terus berlanjut dan rasio dapat turun ke 60%-80%, maka kondisi keuangan daerah akan lebih sehat.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian keuangan daerah digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasional dibandingkan dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan prioritas pengeluaran pemerintah daerah, apakah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional (rutin) atau belanja modal (investasi pembangunan). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio

Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja Operasi.

Rasio belanja operasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi belanja operasional dibandingkan dengan total belanja daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar alokasi anggaran yang digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah dibandingkan dengan belanja modal atau belanja lainnya.

Rumus untuk menghitung rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi I} = \frac{\text{Total belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio belanja operasi terlihat pada tabel 4.4

Tabel 4
Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2019	1.674.330.000.000	2.974.060.000.000	56,30%
2020	1.621.910.000.000	3.008.050.000.000	53,92%
2021	1.632.678.393.670	2.930.408.271.240	55,72%
2022	2.048.440.000.000	3.053.180.000.000	67,09%
2023	1.992.100.000.000	2.495.290.000.000	79,83%

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Rasio belanja operasi mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada 2022-2023. Tahun 2019- 2021, rasio belanja operasi berada dalam rentang 53,92% - 56,30%, menunjukkan bahwa lebih dari separuh belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi.

Kenaikan rasio ini menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional semakin besar. Meskipun belanja operasi diperlukan untuk keberlangsungan pelayanan publik (gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan operasional lainnya), rasio yang terlalu tinggi

dapat mengindikasikan rendahnya ruang fiskal untuk belanja modal dan investasi pembangunan daerah. Lonjakan dari 67,09% (2022) menjadi 79,83% (2023) mengindikasikan bahwa porsi belanja modal semakin berkurang. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut apakah disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai atau faktor lain seperti penurunan belanja modal akibat keterbatasan fiskal.

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Belanja modal mencerminkan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang. Rumus untuk menghitung Rasio belanja Modal yaitu:

$$Rasio\ Belanja\ Modal\ I = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio belanja modal terlihat pada tabel 4.5

Tabel 5
Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun	Total belanja Modal (Rupiah)	Total Belanja Daerah (Rupiah)	Rasio Belanja Modal (%)
2019	543.820.000.000	2.974.060.000.000	18,29%
2020	591.450.000.000	3.008.050.000.000	19,66%
2021	543.819.807.490	2.930.408.271.240	18,56%
2022	561.820.000.000	3.053.180.000.000	18,40%
2023	502.700.000.000	2.495.290.000.000	20,15%

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja modal Provinsi Maluku 2019-2023 berada pada kisaran 18%-20%, dengan nilai tertinggi pada 2023 (20,15%) dan terendah pada 2019 (18,29%). Meskipun relatif stabil, kenaikan pada 2023 lebih disebabkan oleh penurunan total belanja daerah, bukan peningkatan signifikan belanja modal. Kondisi ini menunjukkan komitmen yang

konsisten terhadap investasi aset dan infrastruktur, tetapi masih tergolong rendah karena idealnya belanja modal sebaiknya di atas 20% agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan berbagai aspek keuangan dari waktu ke waktu. Dalam konteks analisis keuangan pemerintah daerah, rasio ini dapat digunakan untuk menilai perkembangan pendapatan, belanja, dan aset dari tahun ke tahun. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6

Tabel 6
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku
Tahun 2019-2023

KETERANGAN	TAHUN					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
PAD	482.810.000.000	545.750.000.000	550.808.914.760	637.950.000.000	664.660.000.000	
Pertumbuhan PAD	-	13,04%	0,93%	15,82%	4,19%	8,49%
Pendapatan	3.108.920.000.000	3.045.830.000.000	3.263.530.689.180	2.948.180.000.000	3.068.560.000.000	
Pertumbuhan Pendapatan	-	-2,03%	7,15%	-9,66%	4,08%	-0,12%
Belanja Operasi	1.674.330.000.000	1.621.910.000.000	1.632.678.393.670	2.048.440.000.000	1.992.100.000.000	
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	-3,13%	0,66%	25,47%	-2,75%	5,06%
Belanja Modal	543.820.000.000	591.450.000.000	543.819.807.490	561.820.000.000	502.700.000.000	
Pertumbuhan Belanja Modal	-	8,76%	-8,05%	3,31%	-10,52%	-1,63%

Sumber: Diolah penulis (2024) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA

Tabel 6 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Provinsi Maluku berfluktuasi dengan rata-rata 8,49% per tahun. Tahun 2020 PAD tumbuh 13,04%, melambat menjadi 0,93% pada 2021, melonjak 15,82% pada 2022, lalu turun kembali 4,19% pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan menjaga stabilitas kemandirian fiskal, meskipun sempat ada dorongan dari pemulihan pascapandemi. Sementara itu, pertumbuhan total pendapatan daerah cenderung stagnan dengan rata-rata -0,12%, ditandai penurunan pada 2020 (-2,03%) dan 2022 (-9,66%), serta pertumbuhan positif pada 2021 (7,15%) dan 2023 (4,08%). Ketidakstabilan ini sebagian besar dipengaruhi oleh variabilitas dana transfer dan penerimaan lain-lain.

Dari sisi pengeluaran, belanja operasi tumbuh rata-rata 5,06% dengan pola fluktuatif: turun -3,13% pada 2020, naik tipis 0,66% pada 2021, melonjak 25,47% di 2022, lalu kembali turun -2,75% pada 2023. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan belanja rutin yang tidak stabil. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan tren menurun dengan rata-rata -1,63%, meskipun sempat tumbuh 8,76% pada 2020 dan 3,31% pada 2022, tetapi anjlok pada 2021 (-8,05%) dan 2023 (-10,52%). Penurunan ini mengindikasikan keterbatasan alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur, yang berpotensi menghambat pembangunan daerah jangka panjang.

Pembahasan

Berikut adalah pembahasan mendalam berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja melalui PAD tanpa bergantung pada transfer pusat. Pada Provinsi Maluku periode 2019–2023, rasio ini berfluktuasi pada kategori “Rendah Sekali” hingga “Rendah”, dengan puncak 28,05% pada 2022, sedangkan tahun lain berkisar 18,41%–21,84%. Kondisi ini menandakan ketergantungan tinggi pada dana transfer. Menurut Marselina et al. (2021),

rasio 0%-25% tergolong “Rendah Sekali” dan 25%-50% “Rendah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan Maluku 2018-2021 rata-rata hanya 20,18% (“Rendah Sekali”). Ni Komang Putri Laksmi (2023) juga menegaskan bahwa rasio rendah mencerminkan ketergantungan pada pemerintah pusat.

Padahal, Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, namun kontribusinya pada PAD masih minim. Statistik Keuangan Daerah BPS Maluku (2023) menunjukkan APBD masih didominasi pendapatan transfer. Karena itu, strategi peningkatan PAD diperlukan, melalui pengembangan sektor unggulan, perbaikan pengelolaan pajak dan retribusi, peningkatan investasi, serta penguatan kapasitas aparatur daerah.

Rasio efektifitas PAD

Analisis rasio efektivitas PAD Provinsi Maluku tahun 2019-2023 menunjukkan tren positif, di mana capaian 2022 dan 2023 masuk kategori “Sangat Efektif”. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah merealisasikan PAD sesuai target, sebagaimana ditegaskan Halim (2002) bahwa rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Azhari et al. (2021) juga menekankan bahwa efektivitas PAD erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah memaksimalkan penerimaan sesuai target, sementara Mat Juri (2012) menemukan bahwa pemungutan pajak di Maluku Tenggara Barat tergolong kurang efektif. Perkembangan terbaru di Maluku menunjukkan perbaikan signifikan, dari “Tidak Efektif” pada 2019 menjadi “Sangat Efektif” pada 2022-2023. Peningkatan ini didukung oleh diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pajak dan retribusi, meskipun keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar efektivitas PAD terus meningkat.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Maluku menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2023. Secara umum, rasio ini berada pada kisaran 97,53% hingga 102,76%, dengan tiga tahun (2019, 2021, dan 2023) dikategorikan sebagai Efisien dan dua tahun (2020 dan 2022) dikategorikan sebagai Tidak Efisien. Tahun 2019, 2021, dan 2023, rasio efisiensi berada di bawah 100%, menunjukkan bahwa belanja daerah tidak melebihi pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang relatif baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah menyatakan bahwa efisiensi keuangan daerah dianggap baik jika rasio belanja terhadap pendapatan tidak melebihi 100%.

Pada tahun 2020 dan 2022, rasio efisiensi melebihi 100%, menunjukkan adanya defisit anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, terutama pada masa pandemi COVID-19 (2020) dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi (2022). Studi oleh Agustina dan Prasetyo (2021) dalam jurnal *Journal of Regional Finance and Accounting* menyebutkan bahwa defisit anggaran sering terjadi pada masa krisis ekonomi karena meningkatnya kebutuhan belanja sosial dan kesehatan. Ketidakefisienan pada tahun-tahun tertentu menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap alokasi belanja daerah, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah.

Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi Provinsi Maluku meningkat signifikan dari 56,30% pada 2019 menjadi 79,83% pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa belanja operasi semakin mendominasi total belanja daerah, yang berimplikasi pada berkurangnya ruang fiskal untuk belanja modal dan investasi pembangunan. Menurut Halim (2014), belanja operasi yang terlalu besar dibandingkan belanja modal menunjukkan ketergantungan tinggi pada

pengeluaran rutin dan dapat menghambat pertumbuhan infrastruktur daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa efisiensi belanja daerah harus diukur dari keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Secara teoritis, idealnya rasio belanja operasi tidak melebihi 60%-70% dari total belanja daerah agar pembangunan tetap mendapat porsi yang memadai.

Peningkatan rasio belanja operasi hingga 79,83% pada 2023 mengindikasikan bahwa anggaran untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta pemeliharaan aset semakin besar, sementara belanja modal menurun. Setyowati & Wiratno (2019) menemukan bahwa daerah dengan rasio belanja operasi tinggi cenderung memiliki tingkat investasi rendah serta ketergantungan besar pada dana transfer pusat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Suryani (2020) yang menyimpulkan bahwa rasio belanja operasi di atas 70% berisiko mengurangi kemampuan anggaran dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Nurhidayat et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan belanja operasi sering kali berkaitan dengan bertambahnya jumlah pegawai daerah dan meningkatnya beban operasional rutin.

Bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik ekonomi bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan, dominasi belanja operasi hingga 79,83% berpotensi menghambat pembangunan ekonomi daerah. Dampak yang ditimbulkan antara lain berkurangnya alokasi belanja modal untuk infrastruktur, meningkatnya ketergantungan pada transfer pusat, serta terbatasnya investasi di sektor produktif seperti industri dan UMKM. Kondisi ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Data BPS Maluku (2023) menegaskan bahwa infrastruktur dan konektivitas antarwilayah masih menjadi tantangan utama, yang seharusnya mendapatkan porsi belanja modal lebih besar dibandingkan belanja operasi.

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal Provinsi Maluku mengalami fluktuasi, dengan nilai

tertinggi pada 2023 sebesar 20,15% dan terendah pada 2019 sebesar 18,29%. Persentase 2023 yang lebih tinggi lebih disebabkan oleh penurunan total belanja daerah, bukan peningkatan signifikan pada belanja modal itu sendiri. Menurut Halim (2020), belanja modal idealnya mencapai minimal 20%–30% dari total belanja daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori fiskal Musgrave & Musgrave (1989), belanja modal memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasional cenderung bersifat konsumtif. Penelitian Purwanto & Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa daerah dengan rasio belanja modal di atas 20% memiliki infrastruktur lebih baik dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sedangkan Amiruddin (2020) menegaskan bahwa rasio di bawah 20% menandakan dominasi belanja pegawai dan operasional yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Mardiasmo (2018) yang menekankan bahwa rasio belanja modal rendah menggambarkan tingginya ketergantungan fiskal, terutama di daerah dengan PAD terbatas.

Dalam konteks Maluku, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi karena kontribusi PAD relatif rendah. Kondisi infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih yang belum merata memperlihatkan bahwa kebutuhan belanja modal sangat mendesak. Pandemi COVID-19 semakin mempersempit kapasitas fiskal daerah, karena anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja operasional dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, strategi penganggaran yang lebih agresif diperlukan untuk meningkatkan proporsi belanja modal, sehingga pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Maluku dapat diperkuat secara berkelanjutan.

Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan PAD Provinsi Maluku dengan tahun dasar 2019 menunjukkan fluktuasi, yakni meningkat 13,04% pada 2020, melambat 0,93% di 2021, melonjak 15,82% pada 2022, lalu turun menjadi 4,19% di 2023. Dinamika ini menggambarkan ketidakstabilan sumber PAD sehingga kontribusinya

terhadap kemandirian fiskal belum konsisten. Halim (2001) menekankan pentingnya pertumbuhan PAD yang stabil sebagai cerminan kemampuan daerah mengelola sumber daya, sementara Muzan (2019) menunjukkan PAD tidak selalu signifikan memengaruhi pengeluaran karena ketergantungan pada transfer pusat masih dominan.

Fluktuasi juga terlihat pada pertumbuhan total pendapatan daerah, dengan kontraksi -2,03% di 2020, peningkatan 7,15% di 2021, penurunan -9,66% di 2022, dan kembali naik 4,08% di 2023. Variabilitas ini sangat dipengaruhi oleh dana transfer pusat dan penerimaan lain-lain. Menurut Solow (1956), pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi, sehingga ketidakstabilan pendapatan dapat menghambat investasi daerah. Sejalan dengan itu, Muzan (2019) menegaskan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan, sehingga fluktuasi pendapatan langsung memengaruhi kapasitas pembangunan infrastruktur.

Dari sisi pengeluaran, belanja operasi berfluktuasi dengan penurunan -3,13% pada 2020, kenaikan tipis 0,66% di 2021, melonjak 25,47% pada 2022, lalu turun -2,75% di 2023. Halim (2007) menekankan pentingnya efisiensi belanja operasi, meskipun Muzan (2019) menemukan pengaruhnya terhadap pertumbuhan relatif kecil. Sebaliknya, belanja modal lebih bergejolak: naik 8,76% pada 2020, turun -8,05% di 2021, naik 3,31% pada 2022, lalu jatuh -10,52% di 2023. Halim (2007) menekankan belanja modal sebagai pendorong pertumbuhan, tetapi Muzan (2019) menunjukkan efek negatifnya bila tidak dikelola efisien. Dalam konteks Maluku, penurunan belanja modal berisiko menghambat pembangunan infrastruktur vital dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Provinsi Maluku masih rendah (18,41%–28,05%), sehingga ketergantungan pada transfer pusat tetap tinggi. Efektivitas PAD tergolong baik karena realisasi melebihi

target, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih kecil. Efisiensi keuangan fluktuatif, dengan beberapa tahun tidak efisien. Belanja daerah didominasi belanja operasi (hingga 79,83%), sementara belanja modal relatif rendah (18%-20%), membatasi investasi infrastruktur. Pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah juga tidak stabil, sedangkan belanja modal yang menurun berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Awani, Melina F., and Swarmilah Hariani. *Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Akurasi*, vol. 3, no. 2, 2021, doi:[10.36407/akurasi.v3i2.158](https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Maluku*. Maluku: BPS.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2021). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fathah, NR. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. *EBBANK*. 8(1). 33-48.
- Halim, A. (2012). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2020). *Keuangan Daerah: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Daerah Provinsi Maluku*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marselina, et al. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Maluku*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 45-60.
- Mat Juri. (2012). *Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 123-135.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Ni Komang Putri Laksmi. (2023). *Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Maluku*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 78-92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramono, Joko. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makari. 7(1). 83-112.

Rahmatina. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: Wiley.

Setyowati, & Wiratno. (2019). *Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur: Analisis Rasio Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(2), 89-104.

Siregar, A.L. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suryani. (2020). *Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia: Analisis Rasio Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 18(3), 112-128.

Susanto, Hery. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Jurnal Distribus, 7(1). 81-92,

Tumija, & Shinta, G. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Republik, 9(2), 61-78.

World Bank. (2020). *Indonesia Economic Quarterly: Resilience through Reforms*. Washington, D.C.: World Bank.